

**REVENUE ANALYSIS IN BUDGET REALIZATION REPORTS TO ASSES FINANCIAL
PERFORMANCE**

(Studies on Financial And Asset Management Bodies in the Medan City Area)

Nur Halijah, Nurwani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : nurhalijah2871@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the level of effectiveness and financial performance of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Medan City. Where, the variable taken in this research is the income stated in the Budget Realization Report (LRA). Income is one of the important elements because it affects how the continuity of an organization going forward. Public sector government agencies should prepare budgets and manage them properly. Because the budget is very important to support an organization in achieving its goals. Budget and revenue, both of which can be identified and viewed in the budget realization report. This type of research is quantitative descriptive with data in the form of the Medan City BPKAD Budget Realization Report in 2021. The analytical method used in this study is the effectiveness ratio by comparing the realization of PAD receipts and PAD revenue targets. The results showed that the level of effectiveness of the Medan City BPKAD was 89%. That means, the financial performance of the Medan City BPKAD, especially regarding revenues in the budget realization report, is said to be quite effective.

Keywords : Revenue, Budget Realization Report, Financial Performance

**ANALISIS PENDAPATAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI
KINERJA KEUANGAN**

(Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Dimana, variabel yang diambil dalam penelitian ini adalah pendapatan yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pendapatan adalah salah satu elemen penting karena mempengaruhi bagaimana kelangsungan suatu organisasi kedepannya. Lembaga pemerintah sektor publik sudah selayaknya mempersiapkan anggaran dan mengelolanya dengan baik. Sebab, anggaran sangat penting untuk mendukung suatu organisasi dalam mencapai sasaran. Anggaran dan pendapatan, keduanya dapat diketahui dan dilihat dalam laporan realisasi anggaran. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan data berupa Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kota Medan tahun 2021. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio efektivitas dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dan target penerimaan PAD. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas BPKAD Kota Medan ialah sebesar 89%. Itu berarti, kinerja keuangan BPKAD Kota Medan terutama mengenai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dikatakan cukup efektif.

Kata kunci : Pendapatan, Laporan Realisasi Anggaran, Kinerja Keuangan

PENDAHULUAN

Dalam aktivitas pemerintahan, pengelolaan keuangan biasa disebut dengan akuntansi sektor publik. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah sebuah alat informasi yang sangat berguna dan di perlukan bagi pemerintah sebagai manajemen dan tentunya informasi tersebut harus bisa di sebar luaskan kepada publik. Akuntansi sektor publik adalah serangkaian proses akuntansi pada umumnya yang terdiri atas pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan kemudian pelaporan transaksi keuangan yang di lakukan oleh entitas pemerintah daerah untuk nantinya berguna sebagai pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat untuk pihak lain (Dwi Ratmono : 2015).

Akuntansi sektor publik tentu berbeda dengan akuntansi pada umumnya. Jika biasanya akuntansi selalu mengarah kepada laba dan rugi, namun pada akuntansi sektor publik justru lebih mengarah kepada surplus dan defisit. Tidak ada kata untung di dalamnya, karena memang tujuan dari akuntansi sektor publik sendiri bukanlah untuk mencari laba. Penting sekali untuk melakukan perencanaan anggaran dalam akuntansi sektor publik. Hal ini bertujuan, agar pengelolaan dan pelaksanaan dalam pemerintahan dapat berjalan sebagaimana semestinya. Definisi anggaran menurut *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) ialah suatu rencana terkait operasi keuangan yang di harapkan dapat membiayai selama periode tertentu pelaksanaan serta mencakup estimasi pengeluaran dan sumber pendapatan.

Sebagai entitas pemerintah, tentu harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan aturan yang terdapat di undang-undang. Lembaga pemerintah haruslah membuat laporan keuangan pada umumnya, salah satunya adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Menurut Erlina Rasdianto (2013 : 23) tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah mengenai sumber, alokasi dan pemakaian yang di sajikan dalam bentuk laporan keuangan untuk menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode laporan. Unsur yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ialah pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Berikut adalah tabel pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan tahun 2021.

Tabel 1 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.139.239.943.474,00	1.906.508.840.907,29
2	Pendapatan Transfer	2.942.065.031.645,00	2.977.574.253.244,00
3	Pendapatan lain-lain yang sah	127.659.200.000,00	138.993.904.317,00
Pendapatan Daerah		5.208.964.175.119,00	5.023.076.998.468,29

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kota Medan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, total anggaran yang di targetkan memiliki nilai lebih besar ketimbang realisasinya. Dari hal itu dapat di simpulkan bahwasanya kinerja pendapatan belum bisa di katakan baik. Menurut Mahmudi (2016 : 66) anggaran pendapatan adalah batas minimal dari pendapatan yang akan diperoleh. Untuk itu, suatu pendapatan dikatakan baik jika nilai realisasinya lebih besar ketimbang anggarannya. Di lihat dari rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan Tahun 2021, dapat diketahui latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah kinerja pendapatan daerah BPKAD Kota Medan yang belum sepenuhnya bisa di katakan baik. Karena, nilai realisasinya jauh lebih besar daripada anggaran yang di targetkan. Eka Melliya Dona dan Verza Ayu Lestari dalam penelitiannya menemukan tingkat efektivitas sebesar 114,39% pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU tahun 2013-2017. Dengan angka tersebut, dapat diketahui kriteria perusahaan ialah sangat efektif karena berhasil mencapai lebih dari 100%. Penelitian lain yang dilakukan oleh Astria Nur Jannah Dien dan teman-temannya juga membuktikan tingkat efektivitas sebuah perusahaan di atas 100% dan terbilang sangat efektif dalam pelaksanaan anggaran pendapatannya. Meski begitu, ada juga penelitian yang berhasil menemukan sebuah perusahaan bisa juga dikatakan tidak efektif. Pernyataan tersebut diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Ruliaty dan teman-temannya. Dimana, setelah melakukan analisis ternyata mereka mendapatkan hasil perbandingan sebesar 32,96% dan terbilang tidak efektif karena kurang dari 60%. Selama penulis melaksanakan

kegiatan Kerja Praktek (Magang) di Bagian Akuntansi, ada salah satu masalah yang terjadi yakni nilai realisasi pendapatan daerah BPKAD Kota Medan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada tahun 2021 ternyata lebih kecil dari target anggaran yang sudah ditetapkan atau yang ingin dicapai. Sebab, baik atau tidaknya perusahaan juga ditentukan oleh berhasil atau tidaknya semua anggaran dijalankan. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian sebagai hasil magang yakni apakah kinerja pendapatan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan dapat dikatakan efektif? Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian sebagai hasil magang yang dilakukan penulis ialah untuk mengetahui kinerja pendapatan daerah BPKAD Kota Medan jika dilihat melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Untuk perusahaan, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi agar BPKAD Kota Medan bisa bertumbuh kembang jauh lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2010:3) Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga atau departemen tinggi negara dan bawahannya dengan melakukan mekanisme teknik dan analisis akuntansinya. Beberapa lembaga sektor publik yaitu BUMN, BUMD, pemerintah daerah, LSM, yayasan sosial maupun proyek kerja sama swasta dengan sektor publik. Dalam akuntansi sektor publik, terdapat karakteristik yang berbeda dari sektor swasta. Karakteristik utamanya berfokus pada sifat lembaga yang tidak menghasilkan laba (non-profit). Karakteristik lainnya terfokus pada tujuan lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Tujuan akuntansi sektor publik untuk laporan pengelolaan keuangan dan memberikan informasi kepada publik. Dimana, laporan pengelolaan tersebut sebagai pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen. Sebagai pengendalian manajemen, sebuah lembaga harus memberikan informasi secara tepat dan efisien sebagai akuntansi sektor publik. Selain itu, ada juga tujuan lain ialah berhubungan dengan *accountability*. Jadi, suatu lembaga akan memberikan informasi penting yang dibutuhkan oleh manajer lembaga publik sebagai pertanggungjawaban lembaga sektor publik. Di Indonesia, akuntansi sektor publik sangat dibutuhkan untuk pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, partai politik dan berbagai yayasan lain ada akuntansi untuk pengelolaan organisasinya. Selain itu, lembaga lain yang membutuhkan akuntansi dalam pengelolaannya yakni sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit serta bidang pendidikan dan kesehatan.

Akuntansi Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Pengertian tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Daerah yang dimaksud dalam hal ini adalah wilayah otonom yang sudah diatur dalam undang-undangan. Pemerintah kota, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi merupakan daerah otonom yang tidak terpisah dari keuangan daerah. Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dalam PP. No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah kegiatan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan serta operasional pemerintah baik berdasarkan prosedur manual maupun yang sudah terkomputerisasi. Dalam buku yang berjudul *Akuntansi Keuangan Daerah* yang ditulis oleh Abdul Halim dan diterbitkan tahun 2004 oleh Salemba Empat mengatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah laporan keuangan dalam wujud melaksanakan APBD dengan berbagai prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Dimana, sistem akuntansi yang dilakukan adalah pencatatan, penggolongan, penafsiran, dan peringkasan transaksi keuangan. Secara garis besar, Sistem Akuntansi Daerah dapat disimpulkan sebagai serangkaian prosedur dimulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai laporan keuangan terkait pertanggungjawaban APBD baik secara manual ataupun komputerisasi.

Teori Pendapatan

Pendapatan merupakan semua jenis penerimaan daerah dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang akan meningkatkan aktiva atau menurunkan utang. Pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, secara umum di bagi atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Menurut PSAK No. 23 paragraf 7, pendapatan adalah manfaat ekonomi yang timbul atau arus masuk bruto dari suatu aktivitas organisasi/perusahaan dalam periode tertentu dan mengakibatkan kenaikan ekuitas yang bukan berasal dari penanaman modal. Pendapatan adalah arus kas masuk aktiva dari aktivitas penyerahan produksi barang, pemberian jasa dan aktivitas pencarian laba lainnya serta penyelesaian kewajiban pada periode sebelumnya (Kleso, Warfield dan Weygant, 2011:955). Pendapatan adalah penghasilan yang bersumber dari aktivitas operasional perusahaan dan merujuk kepada laba atau keuntungan. Pendapatan diakui pada saat bisa direalisasi dan dihasilkan, hal ini berdasarkan prinsip pengakuan pendapatan (*revenue recognition principle*). Pendapatan dapat direalisasi jika pertukaran langsung dalam bentuk aktiva bisa dikonversi menjadi kas dengan jumlah yang jelas. Pendapatan jika dibuat apabila yang bersangkutan mampu mengatasi apa yang dikerjakan

untuk mendapatkan hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan. Ada beberapa transaksi pendapatan yang diakui dalam prinsip yaitu: (1). Penjualan produk yang diakui pada tanggal penjualan dapat diakui sebagai pendapatan. (2). Pemberian jasa diakui saat jasa sudah diberi dan bisa ditagih dapat diakui sebagai pendapatan. (3). Penjualan aktiva kecuali produk dan diakui pada tanggal penjualan dapat diakui sebagai pendapatan. (4). Bunga sewa dan royalty diakui saat aktiva diterapkan juga dapat diakui sebagai pendapatan. Dalam laporan realisasi anggaran, pendapatan diartikan sebagai penerimaan oleh entitas pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan melalui bendahara menambah SiLPA yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pengakuan pendapatan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tertulis dalam paragraf 19 PSAP 12 yang mengatakan pendapatan-LO diakui pada saat adanya aliran sumber daya ekonomi ke entitas dan timbulnya hak atas pendapatan. Timbulnya hak atas pendapatan diartikan sebagai entitas telah menerima pembayaran namun belum memiliki hak untuk mengakui pendapatan sehingga pengakuannya ditangguhkan. Sehingga, pendapatan yang belum diterima aliran kasnya maupun yang mengakui pendapatan yang diterima aliran kasnya belum menjadi hak entitas yang dilakukan dengan menyesuaikan pendapatan tersebut. Direalisasi maksudnya kas maupun non kas telah diterima oleh entitas tanpa didahului adanya penagihan. Aliran sumber daya ekonomi yang meningkatkan nilai ekuitas diakui pendapatan karena adanya aliran sumber daya ekonomi ke entitas. Jika aliran sumber daya yang diterima tidak meningkatkan ekuitas maka hal tersebut tidak termasuk dalam kategori pendapatan.

Teori Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang nantinya akan di jadikan pedoman tindakan oleh perusahaan atau organisasi serta di susun selama satu periode secara sistematis (Abdul Hafiz Tanjung, 2009 : 81). Anggaran juga dapat di artikan dengan rencana atau acuan yang di jadikan dasar dalam pelaksanaan dan pengelolaan suatu organisasi pemerintahan. Anggaran selalu berhubungan dengan dana yang cenderung terus di putar balik sesuai kebutuhan. Anggaran juga tidak lepas dari arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar. Selain anggaran, di dalam akuntansi pemerintahan juga terdapat anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik adalah pelaksanaan program-program yang di biayai dengan uang publik dan merupakan instrument akuntabilitas terhadap pengelolaan dana publik (Mardiasmo, 2009 : 12). Pengertian lain mengenai akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengelompokkan, dan pelaporan seperti halnya akuntansi pada umumnya. Namun, dalam akuntansi sektor publik tidak mengenal yang namanya laba atau rugi, melainkan surplus atau defisit. Karena, lembaga sektor publik memang tidak berkaitan dengan untung atau ruginya suatu organisasi. Laporan keuangan paling umum dalam akuntansi pemerintahan ialah laporan realisasi anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebuah laporan yang realisasinya menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang menggambarkan anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya sebagai perbandingan (Gege Edy Prasetya, 2010 : 6). Ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi dan dikelola dalam satu periode laporan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Ada beberapa hal yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, diantaranya: (1). Pendapatan-LRA, yakni penerimaan daerah melalui bendahara yang menambah SiLPA pada tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak pemerintah sehingga tidak perlu melakukan pengembalian. (2). Belanja, yakni pengeluaran yang mengurangi SiLPA dan dilakukan oleh entitas pemerintah melalui bendahara pada tahun anggaran tertentu dan tidak akan mendapat pembayaran kembali dari pemerintah. (3). Transfer, yakni berhubungan dengan pengeluaran ataupun penerimaan uang dari suatu entitas kepada entitas lain termasuk Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan. (4). Pembiayaan (*financing*), yakni kekayaan yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas dan berhubungan dengan penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan atau tahun anggaran kemudian dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara target anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan keuangan. Dimana, dalam penerimaan pembiayaan berasal dari pinjaman dan hasil divestasi sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain untuk pemberian pinjaman, penyertaan modal oleh pemerintah dan pembayaran kembali pokok pinjaman.

Teori Anggaran

Anggaran adalah sesuatu yang dinyatakan dalam ukuran moneter mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh sebuah organisasi (Mahsun, 2015:65). Pengertian anggaran dalam akuntansi sektor publik yakni pelaksanaan program-program yang di biayai dengan uang publik karena termasuk instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik. Setiap program maupun aktivitas sektor publik membutuhkan alokasi dana. Untuk itu, perlu di siapkannya anggaran karena merupakan sesuatu hal yang penting untuk menunjang operasional perusahaan. Proses penganggaran memiliki beberapa tujuan yaitu : (1). Meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah untuk mencapai tujuan fiskal. (2). Menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan untuk menciptakan efisiensi dan keadilan. (3). Memenuhi prioritas belanja pemerintah. (4). Meningkatkan pertanggungjawaban dan transparansi pemerintah kepada masyarakat luas dan DPR/DPD.

Selain itu, ada beberapa faktor yang dominan dalam penganggaran diantaranya: (1). Adanya target atau tujuan yang hendak dicapai. (2). Faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah dan ketersediaan sumber dayanya. (3). Ada waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target. (4). Munculnya peraturan pemerintah terbaru, perubahan sosial dan politik serta bencana alam.

Kinerja Sektor Publik

Kinerja keuangan perusahaan adalah suatu gambaran yang mencerminkan perihal kondisi keuangan perusahaan yang kemudian mempengaruhi prestasi kerja dalam periode tertentu. Menurut Fahmi (2014:2) Kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk melihat apakah sebuah perusahaan sudah melakukan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar serta untuk melihat sejauh mana perusahaan melaksanakan tanggungjawabnya. Kesuksesan organisasi diukur oleh kinerja yang reliabel. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah pencapaian suatu strategi yang dinilai dengan alat ukur finansial dan nonfinansial dengan tujuan untuk membantu manajer publik. Suatu organisasi dapat menetapkan *reward and punishment* jika menjadikan sistem pengukuran kinerja sebagai alat pengendalian. Adapun maksud dari pengukuran kinerja dapat diuraikan sebagai berikut: (1). Kinerja pemerintah dapat terbantu dan diperbaiki. (2). Dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan keputusan dan pengalokasian sumber daya. (3). Memperbaiki komunikasi kelembagaan dan mewujudkan pertanggungjawaban publik.

Sistem pengukuran kinerja memiliki tujuan yang diuraikan sebagai berikut: (1). Strategi akan dikomunikasikan dengan lebih baik. (2). Kinerja finansial dan non-finansial dapat diseimbangkan melalui ukuran kinerja. (3). Memotivasi pencapaian *goal congruence* serta mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level bawah sampai menengah. (4). Kepuasan individu maupun kolektif yang rasional dapat dicapai dengan ukuran kinerja sebagai alatnya.

Selain tujuan pengukuran kinerja, ternyata informasi yang digunakan juga berhubungan dengan pengukuran kinerja. Informasi yang dimaksud adalah informasi finansial dan informasi non-finansial. Menganalisis varians antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan adalah pengertian dari penilaian kinerja finansial. Analisis varians terdiri dari varians pengeluaran/belanja, varians pembiayaan dan varians pendapatan. Identifikasi sumber dan penyebab terjadinya varians tersebut dapat dilakukan setelah analisis varians, dan kesulitan menetapkan batasan besarnya varians sebagai keterbatasan analisis varians. Sedangkan informasi non-finansial dapat menyebabkan terjadinya penambahan keyakinan terhadap proses pengendalian manajemen jika dilihat dari kualitasnya. Pengukuran kinerja yang digunakan dan dikembangkan dalam berbagai organisasi ialah *Balance Scorecard*. Adapun aspek-aspek yang digunakan untuk pengukuran dengan *balance scorecard* yaitu: (1). Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. (2). Perspektif efisiensi proses internal. (3). Perspektif finansial. (4). Perspektif kepuasan pelanggan

Informasi non-finansial dinyatakan dalam bentuk variabel kunci melalui faktor-faktor yang merupakan penyebab kesuksesan organisasi karena merupakan variabel yang diindikasikan. Adapun karakteristik variabel kunci diuraikan sebagai berikut: (1). Menjelaskan faktor kegagalan organisasi maupun faktor pemicu keberhasilannya. (2). Dapat berubah dengan cepat karena sangat *volatile*. (3). Tidak dapat diprediksi perubahannya. (4). Tindakan harus dilakukan sesegera mungkin jika terjadi perubahan. (5). Dapat diukur secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pengukuran kinerja, faktor keberhasilan yang paling utama ialah area yang diindikasikan untuk mencapai kesuksesan dan kinerja unit perusahaan atau organisasi. Indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran yang baik dan bersifat finansial maupun non-finansial disebut sebagai indikator kinerja kunci.

Teori Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2018 : 166) bahwa efektivitas pada umumnya selalu berhubungan dengan hasil guna (target kebijakan) atau pencapaian tujuan. Suatu operasional dikatakan efektif jika sasaran akhir berhasil di capai sesuai dengan tujuan awal yang sudah ditentukan. Suatu organisasi dikatakan sangat efektif pada proses kerja, jika output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan semakin besar. Efektivitas juga diartikan sebagai ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi karena merupakan hubungan antara output dan tujuannya (Beni, 2016 : 69). Semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu organisasi dianggap semakin efektif karena tingkat keberhasilan yang dihasilkan organisasi untuk mencapai sasaran. Menurut Ravianto (2014 : 11) Efektivitas ditentukan oleh seberapa baik seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Jika pekerjaan memiliki perencanaan yang baik maupun mutu dan kinerjanya, maka dapat dikatakan efektif. Efektivitas juga diartikan sebagai pencapaian target dengan membandingkan output realisasi dan output anggaran. Efektivitas adalah satu hal penting yang harus dicapai oleh sebuah organisasi dengan menggunakan konsep-konsep teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan efektivitas. Efektivitas dalam laporan realisasi anggaran, dilihat dan diukur berdasarkan penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Hal ini sudah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 Tahun 1996 dalam tabel berikut :

Tabel 2 : Kriteria Efektivitas

Tingkat Efektivitas	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Kriteria tingkat efektivitas penerimaan PAD diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900.327 Tahun 1996 diuraikan sebagai berikut: (1). Penerimaan PAD dikatakan sangat efektif jika hasil perbandingannya lebih dari 100%. (2). Penerimaan PAD dikatakan efektif jika hasil perbandingannya antara 90-100%. (3). Penerimaan PAD dikatakan cukup efektif jika hasil perbandingannya antara 80-90%. (4). Penerimaan PAD dikatakan kurang efektif jika hasil perbandingannya antara 60-80%. (5). Penerimaan PAD dikatakan tidak efektif jika hasil perbandingannya kurang dari 60%. Berdasarkan ukuran kriteria diatas, dapat diketahui golongan efektivitasnya berdasarkan angka persentasenya. Suatu organisasi dengan penerimaan PAD yang dianggap efektif jika nilai persentasenya melebihi angka 100%. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan nilai realisasi dan target anggaran dalam laporan realisasi anggarannya. Untuk penerimaan PAD yang dianggap efektif, organisasi harus mencapai angka persentase berkisar antara 90-100%. Angka tersebut juga diperoleh dari hasil perbandingan antara nilai realisasi pendapatan dan anggaran yang ditargetkan. Penerimaan PAD dianggap cukup efektif jika persentase perbandingannya mencakup angka 80-90%. Meskipun masih terbilang cukup, setidaknya suatu organisasi dapat dikatakan layak terkait penerimaan PAD-nya. Penerimaan PAD dianggap kurang efektif saat persentase nilai perbandingannya hanya mencapai angka 60-80%. Tentu hal seperti ini yang harus di minimalisir oleh suatu organisasi karena akan mempengaruhi dan berdampak terhadap kinerja organisasi. Penerimaan PAD dianggap tidak efektif jika persentase nilai perbandingannya kurang dari 60%. Hal ini tentu harus bisa dihindari, namun jika sudah terjadi maka suatu organisasi harus melakukan yang namanya evaluasi. Mencari tahu dimana dan apa letak kekurangannya lalu kemudian memperbaikinya untuk periode kedepan. Membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD dapat di lakukan untuk mengukur tingkat efektivitas dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Karena, hasil yang di peroleh akan di deskripsikan sehingga memberikan keterangan yang lengkap atas masalah untuk kemudian seluruh data di kumpulkan, disusun kemudian di analisis. Deskriptif adalah metode analisa yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keseluruhan data yang terkumpul agar lebih jelas (Sugiyono, 2008 : 206). Menurut Kuncoro (2013 : 145) data kuantitatif di ukur dengan angka (skala numerik).

Objek Penelitian

Objek atau tempat pada penelitian kali ini ialah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKAD Kota Medan Tahun 2021.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui perantara karyawan yang bekerja di BPKAD Kota Medan. Penulis meminta informasi mengenai LRA Tahun 2021 untuk kemudian diolah dan di analisis oleh penulis/peneliti. Tolak ukur yang di gunakan dalam penelitian ini ialah efektivitas untuk mengukur kinerja pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mewujudkan *good governance* sangatlah di perlukan dalam pemerintahan. Pemerintahan yang baik di tentukan berdasarkan kinerja dan realisasinya kepada publik. Ada tanggungjawab yang harus di canangkan dan di tuangkan dalam bentuk laporan sebagai pertanggungjawaban. Jenis laporan keuangan yang paling umum dalam

pemerintahan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sebelum menyusun neraca dan laporan arus kas, terlebih dahulu harus menyelesaikan Laporan Realisasi Anggaran.

Dalam LRA, tentulah tidak bisa di pisahkan dari yang namanya anggaran. Di kegiatan apapun, anggaran memang sangat di perlukan sebagai rancangan dan acuan dalam melangkah kedepannya. Di lembaga pemerintahan, anggaran berperan sebagai tulang punggung yang di gunakan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran memiliki peran penting yakni sebagai pengendalian organisasi, stabilisasi, alokasi sumber daya publik, distribusi, perencanaan serta penilaian kerja. Itu sebabnya, laporan realisasi anggaran adalah salah satu laporan yang harus di pertanggung jawabkan lembaga pemerintah dalam menangani dan mengelola keuangan daerah. Sesuai dengan namanya, laporan realisasi anggaran di buat untuk mengetahui perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada periode tertentu, umumnya satu periode pelaporan. Elemen dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan ialah pendapatan, transfer, belanja, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto dan sisa lebih/kurang pembiayaan.

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis laporan realisasi anggaran BPKAD Kota Medan tahun 2021 terkait pendapatannya. Tolak ukur yang di gunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas. Penulis ingin mengetahui apakah anggaran pendapatan BPKAD Kota Medan sudah efektif atau belum.

Hasil Penelitian

BPKAD Kota Medan adalah lembaga pemerintah yang menangani masalah keuangan dan aset daerah kota Medan. Baik atau buruknya suatu entitas di tentukan oleh kinerja yang di lakukan entitas tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut, perlu di ketahui dengan cara mengamati dan mengevaluasi terutama dalam hal efektivitas dan efisiensinya. Kedua hal ini tentu sangat penting, karena jika suatu entitas mampu menjalankan operasional dengan efektif dan efisien, maka entitas tersebut bisa di katakan cukup baik. Untuk mengetahui kinerja pendapatan dalam suatu organisasi, dapat dilihat dari nilai efektifitasnya. Kinerja akan semakin efektif jika nilai efektifitasnya tinggi dan lebih dari 100%. Bagaimana cara mengetahui nilai efektifitasnya? Tentu dengan mengukur nilai perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaannya. Berikut adalah hasil tingkat efektivitas pendapatan daerah BPKAD Kota Medan dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dan target penerimaan PAD:

Tabel 3 : Tingkat Efektivitas Pendapatan Daerah BPKAD Kota Medan

Tahun	Target Penerimaan PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2021	2.139.239.943.474,00	1.906.508.840.907,29	89%	Cukup Efektif

Berdasarkan hasil penelitian dengan rasio perbandingan realisasi dan target penerimaan PAD di atas, dapat di ketahui bahwasanya kinerja BPKAD Kota Medan “Cukup Efektif” dengan tingkat efektifitasnya sebesar 89%. Suatu entitas di sebut cukup efektif jika tingkat efektifitasnya berada di antara rentang 80-90%. Hal itu sudah di atur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 Tahun 1996.

Hal ini berarti bahwa BPKAD Kota Medan sudah cukup berhasil mencapai sasaran berdasarkan tujuan awal yang sudah di tentukan. Karena, makna dari kata cukup adalah sudah memadai dan dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa kinerja BPKAD cukup efektif karena sudah mencapai rasio yang memadai untuk mencapai sasaran.

Secara garis besar, nilai realisasi anggaran memang harus lebih besar daripada anggaran yang ditargetkan. Karena, hal itu sesuai dengan ketentuan anggaran pada umumnya. Jika dalam belanja daerah, nilai realisasi harus lebih kecil daripada target anggaran. Maka dalam pendapatan daerah adalah sebaliknya. Realisasi penerimaan/pendapatan harus lebih besar daripada target anggarannya. Andai hal tersebut tercapai, maka kinerja pendapatan dalam entitas tersebut dapat di katakan cukup efektif, efektif atau sangat efektif. Tolak ukur untuk melihat kinerja organisasi dilihat berdasarkan kemampuan organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Cukup artinya memadai. Efektif artinya tujuan yang ingin dicapai benar-benar terealisasi dengan baik. Sedangkan sangat efektif, memiliki arti bahwa kinerja organisasi lebih dari cukup atau bahkan melebihi sasaran yang ingin dicapai.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa kinerja pendapatan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan diketahui “Cukup Efektif” dengan tingkat efektivitasnya sebesar 89%. Sebagai lembaga pemerintah yang baik dan taat peraturan, sudah sepatutnya bagi BPKAD Kota Medan patuh dan mematuhi peraturan yang ada. Salah satu bentuk kepatuhan yang bisa dilakukan adalah mengelola anggaran dengan sebaik-baiknya lalu dibuktikan dengan laporan keuangan. Salah satu laporan umum yang harus di buat adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). BPKAD Kota Medan harus meningkatkan penerimaan agar bisa mencapai efektivitas pendapatan sesuai sasaran awal yang ditentukan . Dengan begitu, kinerja keuangan BPKAD Kota Medan akan semakin membaik dan berhasil dalam menjalankan kewajibannya sebagai lembaga sektor publik. Penelitian berikutnya diharapkan untuk meneliti di tempat atau objek yang berbeda sehingga penelitian ini bisa menjadi referensi atau bahan untuk penelitian berikutnya. Selain itu, penulis juga berharap peneliti selanjutnya dapat melengkapi kekurangan-kekurangan dari penelitian ini. Karena, penulis menyadari penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna.

DAFTAR RUJUKAN

- Dona, E. M., & Lestari, V. A. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 135.
- Walandouw, S., Tinangon, J., & Dien, A. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 534–541.
- Waney, C. K., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 334–341.
- Rahayu, R. P. (2016). Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. *Makro: Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(01).
- Ratnasari, W., & Munawaroh, S. (2019). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (Lra) Pada Dinas Sosial Kabupaten Berau. *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(1), 49.
- Ruliaty, Ismail Badollahi, A. I. N. (2019). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 40–66.
- Tulung, Joy E. 2017. “PERFORMANCE ANALYSIS OF INCOME AND EXPENDITURE BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TOMOHON Oleh : Christin Marciah Poyoh1 Sri Murni2.” 5(2):745–52.
- Waney, Cindy Kareima, David P. E Saerang dan Stanley W. Alexander. 2018. “Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara.” 13(2):334–41.